



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024



JALAN KHURIPAN NOMOR 21 TELP. (0527) 61468 AMUNTAI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya segenap unsur Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setiap tahunnya ditumpahkan dalam Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Penyusunan Rencana Kerja ini telah diverifikasi oleh Tim Bappedalitbang sehingga Rencana Kerjaini dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/karyawati dan manajemen Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, April 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,



H. M. Haridi, SP, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680915 199703 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2022)	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022 Tahun Lalu Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2017-2022	8
2.2. Analisis Kinerja Bappeda Kab. HSU.....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang.....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN, SASARAN BAPPEDALITBANG	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang.....	51
3.3. Strategi dan Kebijakan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG.....	55
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
BAB V PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan didukung oleh data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja menghasilkan output kegiatan yang berkualitas tetapi juga akan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal demikian menjadikan perencanaan sebagai kebutuhan yang penting, mendasar dan utama. Apalagi dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah dan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pembangunan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pembangunan maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pembangunan daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pemerintah tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk pencapaian kinerja pada tahun 2024.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renja ini dilaksanakan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui:
 - a. Pengolahan data dan informasi,
 - b. Analisis gambaran pelayanan,
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 berdasarkan Renstra,
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD,
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran,
 - g. Perumusan kegiatan prioritas,
 - h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja,
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Salah satu fungsi Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia

dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan terutama dalam bidang perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat mengenai

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

- 4.1. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2017-2022

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitanya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Strategis, pada umumnya capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari tugas pokok adalah:

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Bappedalitbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Bappedalitbang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022, pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.075.692.409,00 dengan realisasi besesar Rp. 6.165.982.714,00 atau 76,35 %, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
I.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.099.999.819	698.683.317	63,52
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	649.840.997	403.192.328	62,04
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	8.004.519	8.004.000	99,99
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	82.818.410	80.028.000	96,63
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	559.018.068	315.160.328	56,38
B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.799.785	38.985.489	38,68
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.799.785	38.985.489	38,68
C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	349.359.037	256.505.500	73,42
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	93.582.820	26.574.500	28,40

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	255.776.217	229.931.000	89,90
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.268.061.049	796.487.127	62,81
D	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	445.513.505	263.495.215	59,14
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.150.035	30.588.049	66,28
8	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.769.825	9.170.000	93,86
9	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.238.325	6.468.000	57,55
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	14.837.105	6.134.000	41,34
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	275.027.501	157.507.444	57,27
12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.114.724	9.638.000	95,29
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.679.410	6.060.000	24,55

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.696.580	37.929.722	70,64
E	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	394.157.733	226.573.312	57,48
15	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	260.128.983	173.021.112	66,51
16	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	37.191.350	17.023.800	45,77
17	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.094.650	22.918.000	46,68
18	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.872.050	10.104.000	67,94
19	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	32.870.700	3.506.400	10,67
F	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	428.389.811	306.418.600	71,53
20	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.705.789	5.768.000	66,25
21	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.714.546	16.505.000	72,66
22	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	51.596.731	30.053.000	58,25

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
23	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	239.301.125	168.724.700	70,51
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.829.870	15.158.500	85,02
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	88.241.750	70.209.400	79,56
III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.210.502.203	1.204.259.515	99,48
G	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	201.000.000	200.102.000	99,55
26	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.500.000	100.079.000	99,58
27	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.500.000	100.023.000	99,53
H	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	932.455.759	927.806.115	99,50
28	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	349.183.695	347.889.280	99,63
29	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	171.158.380	169.377.700	98,96
30	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	412.113.684	410.539.135	99,62
I	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	77.046.444	76.351.400	99,10
31	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	77.046.444	76.351.400	99,10
IV.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.497.129.338	3.466.552.755	77,08

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
J	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.999.555	82.215.700	82,22
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.805	17.023.900	68,10
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.999.750	65.191.800	86,92
K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.845.434.110	2.264.146.646	79,57
34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.835.434.200	2.257.476.646	79,62
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.999.910	6.670.000	66,70
L	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.800.000	193.130.000	87,87
36	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.800.000	63.130.000	70,30
37	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000	130.000.000	100,00
M	Administrasi Umum Perangkat Daerah	872.432.190	617.639.895	70,80
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.788.675	6.981.000	50,63
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.380.575	156.160.900	96,17
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.181.250	57.332.500	77,29
41	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.857.640	19.177.500	64,23
42	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.479.050	19.389.800	65,77
43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.745.000	358.598.195	63,72
N	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.570.633	232.238.916	69,62
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.877.500	4.530.000	38,14

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.503.808	145.291.916	71,75
46	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.615.625	16.630.000	54,32
47	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.573.700	65.787.000	74,27
O	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.892.850	77.181.598	61,31
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.204.850	64.324.598	58,90
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.688.000	12.857.000	77,04
		8.075.692.409	6.165.982.714	76,35

Dari informasi tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi melebihi 50 persen. Namun jika di rinci sampai ke sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang di bawah 50 Persen adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 11.877.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.530.000,- atau 38,14 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai segala logistik kantor yang terdiri dari ATK dan bahan logistik lainnya. Masih adanya dampak dari covid 19 menyebabkan penurunan kebutuhan logistik kantor, namun demikian semua kinerja dapat tercapai secara maksimal yaitu 100%.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Nidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 100.799.785,- terealisasi sebesar Rp. 38.985.489,- atau 38,68 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengisian data yang ada pada aplikasi Database pembangunan yang ada di SIPD. Namun sampai akhir tahun aplikasi SIPD data belum dapat di pergunakan sehingga menyebabkan di batalkan pembayaran honorarium pengelola SIPD data.

3. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 14.837.105,- terealisasi sebesar Rp. 6.134.000,- atau 41,34 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 24.679.410,- terealisasi sebesar Rp. 6.060.000,- atau 24,55 %.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 17.023.800,- terealisasi sebesar Rp. 17.023.800,- atau 45,77 %.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA dengan

anggaran sebesar Rp. 32.870.700,- terealisasi sebesar Rp. 3.506.400,- atau 10,67 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupaun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

Sedangkan realisasi yang lebih dari 50 % merupakan komitmen dan wujud nyata dari Bappedalitbang untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan rencana kerja tahun anggaran 2024 dan perkiraan maju 2025, maka ada beberapa hambatan/masalah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum adanya kejelasan tata laksana kerja berkenaan dengan jabatan fungsional perencana dan fungsional peneliti pembangunan daerah;
2. Belum adanya sistem database yang dapat menghimpun seluruh hasil kajian dan penelitian secara terintegrasi.
3. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi dan pusat.
4. Tempat kerja yang kurang refresentatif.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD/RPD, Renstra Bappedalitbang, RKPD, Renja SKPD.

Secara umum target kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan hasil sebagaimana yang direncanakan. Adapun penjabaran capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel 2.2.1 tersebut dibawah ini :

**5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
TAHUN 2022**

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	7		12		16
				K	Rp	K	Rp	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahun	100%	1.099.999.819	100%	698.683.317	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan yang konsistens dengan RPJMD, yang selaras dengan kebijakan prioritas provinsi dan prioritas nasional	100%	649.840.997	100%	403.192.328	
1	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Pelaksanaan konsultasi publik	2 dokumen	8.004.519	2 dokumen	8.004.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara Pelaksanaan konsultasi publik	1 dokumen	82.818.410	1 dokumen	80.028.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPDP tahun 2022 dan PRKPD 2021	2 dokumen	559.018.068	2 dokumen	315.160.328	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)								
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data SIPD sektoral dan data makro sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	1 Dokumen	100.799.785	1 Dokumen	38.985.489	
4	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data sektoral dan data makro dalam aplikasi sipd, berikut analisis data yang menjadi prioritas daerah	100%	100.799.785	100%	38.985.489	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen profil pembangunan daerah	1 dokumen	0	0 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase IKU RPJMD dengan capaian tinggi	100%	349.359.037	100%	256.505.500	
6	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan dokumen usulan kegiatan DAK	3 Laporan/dokumen	93.582.820	3 Laporan/dokumen	26.574.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen/laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	8 dokumen	255.776.217	8 dokumen	229.931.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan pemerintah dan pembangunan manusia	100%	1.268.061.049	100%	796.487.127	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesesuaian dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	445.513.505	100%	263.495.215	
8	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase tersusunya dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD	100%	46.150.035	100%	30.588.049	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
9	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	100%	9.769.825	100%	9.170.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
10	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pemerintahan	100%	11.238.325	100%	6.468.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
11	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	14.837.105	100%	6.134.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
12	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase tersusunya dokumen perencanaan SKPD yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD	100%	275.027.501	100%	157.507.444	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
13	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi dokumen perencanaan SKPD dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	100%	10.114.724	100%	9.638.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
14	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	100%	24.679.410	100%	6.060.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
15	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	53.696.580	100%	37.929.722	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	100%	394.157.733	100%	226.573.312	
16	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang perekonomian	2 buah	260.128.983	2 buah	173.021.112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

17	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah renja/renstra SKPD yang diverifikasi	5 unit	37.191.350	3 unit	17.023.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang perekonomian	2 buah	49.094.650	2 buah	22.918.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
19	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah renja/renstra SKPD yang diverifikasi	3 unit	14.872.050	3 unit	10.104.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDA	100%	32.870.700	100%	3.506.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase realisasi konsistensi program kegiatan renja SKPD dengan RKPD	100%	428.389.811	100%	306.418.600	
21	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang infrastruktur	5 buah	8.705.789	5 buah	5.768.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Renja/Renstra SKPD yang diverifikasi meningkatnya konsistensi renja SKPD bidang Infrastruktur	5 unit	22.714.546	5 unit	16.505.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
23	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya laporan monev bidang infrastruktur	1 laporan	51.596.731	1 laporan	30.053.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya dokumen rumusan terkait RAD AMPL dan program nasional bidang infrastruktur	2 dokumen	239.301.125	2 dokumen	168.724.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya rumusan perencanaan bidang kewilayahan	2 dokumen	17.829.870	2 dokumen	15.158.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Renja/Renstra SKPD yang diverifikasi meningkatnya konsistensi renja Bidang Kewilayahan dengan RKPD tersedianya rumusan perencanaan bidang kewilayahan	0 unit/SKPD	0	0 unit/SKPD	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
27	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya laporan monev, bidang kewilayahan	0 laporan	0	0 laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

28	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya dokumen rumusan terkait RAD AMPL dan program Nasional bidang kewilayahan	1 Dokumen	88.241.750	2 Dokumen	70.209.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian	100%	1.210.502.203	100%	1.204.259.515	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian inventarisasi kantong-kantong kemiskinan akibat covid 19 beserta penanganannya dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan	100%	201.000.000	100%	200.102.000	
29	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	1 Kajian	100.500.000	1 Kajian	100.079.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
30	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	0 Kajian	0	0 Kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
31	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Kajian Penelitian yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.500.000	1 Dokumen	100.023.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	932.455.759	100%	927.806.115	
32	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian perlindungan produk lokal kab HSU	0 Kajian	0	0 Kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	2 Dokumen	349.183.695	2 Dokumen	347.889.280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
34	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kajian penelitian yang dilaksanakan	1 Dokumen	171.158.380	1 Dokumen	169.377.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
35	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian yang dilaksanakan	1 Kajian	412.113.684	1 Kajian	410.539.135	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	77.046.444	100%	76.351.400	
36	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil-hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan diseminasikan	100%	77.046.444	100%	76.351.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	n/a	4.497.129.338	n/a	3.466.552.755	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatnya kinerja bappelitbang	100%	99.999.555	100%	82.215.700	
37	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja 2022 dan renja perubahan 2021	6 Dokumen	24.999.805	6 Dokumen	17.023.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
38	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA th 2022	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
39	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA th 2021	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
40	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA th 2022	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
41	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA th 2021	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

42	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip, LPPD, dan LKPD, Evaluasi Renja dan Evaluasi kinerja	5 Dokumen	74.999.750	5 Dokumen	65.191.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	2.845.434.110	100%	2.264.146.646	
43	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	100%	2.835.434.200	100%	2.257.476.646	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
44	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan	0%	0	0%	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
45	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan	3 Dokumen	9.999.910	3 Dokumen	6.670.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	219.800.000	100%	193.130.000	
46	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja yang disediakan	100%	89.800.000	100%	63.130.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
47	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	100%	130.000.000	100%	130.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	872.432.190	100%	617.639.895	
48	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya dan tersedianya jaringan instansi listrik serta alat-alat listrik dan elektronik lainnya	100%	13.788.675	100%	6.981.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
49	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 item barang	162.380.575	7 item barang	156.160.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
50	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase kesesuaian spesifikasi barang yang dibutuhkan	100%	74.181.250	100%	57.332.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
51	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase jumlah bahan logistik	100%	29.857.640	100%	19.177.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
52	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	29.479.050	100%	19.389.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
53	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	0%	0	0%	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
54	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat dan koordinasi SKPD	100%	562.745.000	100%	358.598.195	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100%	333.570.633	50%	232.238.916	
55	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	11.877.500	100%	4.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
56	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, langganan listrik dan air	4 Layanan	202.503.808	4 Layanan	145.291.916	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
57	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya barang inventaris kantor	100%	30.615.625	100%	16.630.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
58	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebersihan dan pengamanan kantor	100%	88.573.700	100%	65.787.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	125.892.850	100%	77.181.598	

59	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	35 buah	109.204.850	35 buah	64.324.598	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
60	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	16.688.000	100%	12.857.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			8.075.692.409		6.165.982.714	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Bappedalitbang

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan di daerah selalu mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dengan APBD;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan SKPD terkait.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Seringnya terjadi perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar SKPD;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana.
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat yang menentukan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kemauan, integritas, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu dan berkualitas.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana setiap SKPD dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program dan Data
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
- c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 3) Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 4) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 2) Merumuskan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan RPJMD diantaranya adalah Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kerja.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 5) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan perumusan LPPD, LKPJ, Laporan keuangan, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- 7) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- 8) Melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- 9) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

- 10) Membina, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan.
- 11) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 12) Melaksanakan pengawasan terhadap pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- 14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
- 16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan SKPD guna terwujudnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya.
- 18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan SKPD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD

dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 2) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 3) Penyusunan, pengelohan dan pelaporan pertanggungjawaban penyekenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yan berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai dengan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat.
- 5) Menyelenggarakan urusan program.

- 6) Menyelenggarakan urusan data.
- 7) Menyelenggarakan urusan tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian)
- 8) Menyelenggarakan urusan keuangan
- 9) Menyelenggarakan urusan aset.
- 10) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Sekretariat.
- 11) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- 14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karis bawahan.
- 16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sekreteriat yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan Sekretariat guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik sesuai bidang tugasnya.
- 18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekretariat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur

Kepala bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd) bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
2. Koordinasi penyusunan renstra perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
3. Koordinasi pelaksanaan musrenbang rpjpd, rpjmd dan rkpd bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
4. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
5. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
6. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan k/l di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
7. Koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana kerja anggaran-dokumen pelaksanaan anggaran) di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan

infrastruktur setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
8. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.

9. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
10. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
11. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi.
12. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) Kab/Kota.
13. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program, kegiatan dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
14. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
15. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
16. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
17. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
18. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
19. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
20. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial, budaya dan pembangunan manusia guna terwujudnya tata kelola Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang baik sesuai bidang tugasnya.
21. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur dan menyiapkan alternatif

pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

22. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

4. Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dengan fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Koordinasi dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
3. Koordinasi dan pengkajian kewilayahan.
4. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
8. Koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Koordinasi pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

10. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
12. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
13. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
14. Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
15. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
16. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten.
7. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
8. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
10. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
11. Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
12. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
13. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
14. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
15. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
16. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
17. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.

18. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
19. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
21. Mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
22. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
23. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
24. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
25. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
26. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
27. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
28. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
29. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
30. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna terwujudnya tata kelola Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang baik sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

32. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
34. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan

strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
6. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
8. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten.
9. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.
10. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
11. Mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
12. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
13. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.

14. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
15. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
16. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
17. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
18. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan guna terwujudnya tata kelola bidang Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya.
20. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
21. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. Dalam tabel review Rancangan awal RKPD Tahun 2024, ada kebutuhan pendanaan yang belum teranggarkan. Pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN masih diperlukan penambahan untuk mengakomodir kemungkinan penambahan PPPK.

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Hulu Sungai Utara

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.729.870.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	6.127.323.640	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	100%	48.459.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	100%	48.459.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	24.759.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	24.759.600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	13.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100%	3.315.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100%	4.209.600.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Orang/bulan	3.306.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	4.200.600.000	asumsi penambahan PPPK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	100%	345.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	100%	345.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	85.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	85.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	260.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	260.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	100%	776.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	100%	776.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	94.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	94.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	629.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	629.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	611.154.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	611.154.580	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	137.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	137.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	40.150.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	40.150.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.004.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.004.580	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase BMD yang dipelihara	100%	137.109.460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase BMD yang dipelihara	100%	137.109.460	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	127.109.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	127.109.460	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. HSU	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	1.017.800.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. HSU	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	1.017.800.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. HSU	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	734.800.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. HSU	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	734.800.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	512.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	512.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Kab. HSU	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 dokumen	22.800.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 dokumen	22.800.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	20.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	20.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 berita acara	18.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 berita acara	18.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	40.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	40.000.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. HSU	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		5.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. HSU	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		5.000.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	117.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	117.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	50.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	50.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	50.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	10 dok	156.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	10 dok	156.000.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	100.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	100.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	56.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	56.000.000	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	77.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	77.000.000	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	27.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	27.000.000	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	497.500.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	497.500.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	146.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	146.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	49.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	49.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	9.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	12.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	29.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	29.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	100%	213.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	100%	213.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	67.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	67.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	11.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	11.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	40.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	138.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	138.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	6.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	6.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	31.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	31.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	38.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	38.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	13.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	13.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100%	765.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100%	765.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 dok	20.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 dok	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	1 laporan	20.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	1 laporan	20.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 dok	650.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 dok	650.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	160.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	160.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	150.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	340.000.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	340.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	1 dok	95.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	1 dok	95.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	95.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	95.000.000	
					6.010.170.950					8.407.623.640	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum ada usulan yang disampaikan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kebijakan yang ada pada RKP Tahun 2024, ada beberapa arah kebijakan dan Prioritas Nasional yang menjadi titik berat pemerintah pusat.

A. Arah Kebijakan

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

B. Isu Strategis Prioritas Nasional

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan fase awal dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam beberapa misi dan di buat beberapa tema tahun RKPD. Untuk Tahun 2024 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- b. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata.
- c. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik
- e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
- f. Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate.

Untuk mengimplementasikan prioritas Daerah Kalimantan selatan di buatlah arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024. Untuk bidang infrastruktur termuat dalam Prioritas Daerah

1. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, dengan arah kebijakan :

- 1) Penyediaan infrastruktur pangan
- 2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industry
- 3) Pembangunan dan pengelolaan sarpras distribusi dan pasar
- 4) Pengelolaan daya tarik, Kawasan Strategis dan destinasi pariwisata
- 5) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro

- 6) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 7) **Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat**
 - 8) **Peningkatan Tertib Jasa Konstruksi**
2. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah” dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
 - 2) Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
 - 3) Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 - 4) Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan diseluruh daerah
 - 5) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah - wilayah yang menjadi strategis daerah dan potensial
 - 6) Meningkatkan pola hubungan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur skala besar yang menjadi strategis Daerah
 - 7) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu antar sektor dalam implementasi pelaksanaan pembentukan kawasan - kawasan potensial.
 - 8) Meningkatkan kinerja sistem irigasi yang terintegrasi pada kawasan - kawasan pertanian dengan sistem pengelolaan terpadu
 - 9) Meningkatkan penataan pembangunan infrastruktur dan kawasan lingkungannya dalam mendukung percepatan implementasi kawasan strategis daerah baik bersifat kebutuhan aparatur maupun publik yang telah ditetapkan.
 - 10) Meningkatkan keterpaduan dalam pengadaan tanah untuk kawasan strategis daerah.
 - 11) Mengembangkan sistem penatagunaan tanah yang terintegrasi lintas sektor.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

Penyusunan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2023-2026, dalam rangka mewujudkan program prioritas RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Sesuai dengan Renstra Bappedalitbang Tahun 2023 - 2026,

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2020-2024, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023, maka sasaran Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional, dan produktif	Indek reformasi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappedalitbang	A
2.	Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian IKU RPD dengan nilai ≥ 76 % (tinggi)	85 % (Tinggi)
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	100 %
3.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian Litbang yang dapat dimanfaatkan	100 %

3.3. Strategi dan Kebijakan

3.3.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah;
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan;
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian sesuai dengan permasalahan dan kondisi obyektif sumber daya daerah;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana;
7. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan kinerja kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan.

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas system akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Peningkatan konsistensi implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan;

3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan;
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatkan keikutsertaan sumber daya manusia aparatur pada pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, fungsional maupun teknis;
7. Meningkatkan sistem prosedur dan standar kerja organisasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan 4 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 61 sub kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp. 7.513.023.640,00. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 dan perkiran maju tahun 2025.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

- 1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- 2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia.
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - 7) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel. 4.1
 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								7.513.023.640,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								7.513.023.640,00	
5	01				PERENCANAAN								6.748.023.640,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.232.723.640,00	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								48.459.600,00	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	24.759.600,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.200.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	100 %	13.500.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.315.000.000,00	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	434 Orang/bulan	100 %	3.306.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	9.000.000,00	Lain-lain Pendapatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								345.000.000,00	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	100 %	85.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Orang	100 %	260.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								776.000.000,00	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Paket	100 %	94.000.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	100 %	30.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	23.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	629.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								611.154.580,00	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	12.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	137.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	40.150.000,00	Lain-lain Pendapatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	422.004.580,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								137.109.460,00	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD yang dipelihara	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	127.109.460,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD yang dipelihara	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Lain-lain Pendapatan
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1.017.800.000,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								734.800.000,00	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	512.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	22.800.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Berita Acara	9 Dokumen	20.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Berita Acara	9 Dokumen	18.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Berita Acara	9 Dokumen	40.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	800 Usulan	9 Dokumen	5.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	9 Dokumen	117.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								50.000.000,00	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								156.000.000,00	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	10 Dokumen	100.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Laporan	10 Dokumen	56.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								77.000.000,00	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								497.500.000,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								146.500.000,00	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	7.500.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	-
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	49.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
								Pembangunan Manusia						
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	9.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	12.000.000,00	-
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	29.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								213.000.000,00	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	67.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	30.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	11.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	40.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								138.000.000,00	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	6.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	31.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
								Infrastruktur dan Kewilayahan						
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	38.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	13.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								765.000.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								765.000.000,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								20.000.000,00	
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi									
						-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								650.000.000,00	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	160.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	340.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								95.000.000,00	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	95.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
TOTAL													7.513.023.640,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kebijakan yang ada pada RKP Tahun 2024, ada beberapa arah kebijakan dan Prioritas Nasional yang menjadi titik berat pemerintah pusat.

A. Arah Kebijakan

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

B. Isu Strategis Prioritas Nasional

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan fase awal dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam beberapa misi dan di buat beberapa tema tahun RKPD. Untuk Tahun 2024 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- b. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata.
- c. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik
- e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
- f. Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate.

Untuk mengimplementasikan prioritas Daerah Kalimantan selatan di buatlah arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024. Untuk bidang infrastruktur termuat dalam Prioritas Daerah

1. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, dengan arah kebijakan :

- 1) Penyediaan infrastruktur pangan
- 2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industry
- 3) Pembangunan dan pengelolaan sarpras distribusi dan pasar
- 4) Pengelolaan daya tarik, Kawasan Strategis dan destinasi pariwisata
- 5) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro

- 6) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 7) **Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat**
 - 8) **Peningkatan Tertib Jasa Konstruksi**
2. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah” dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
 - 2) Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
 - 3) Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 - 4) Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan diseluruh daerah
 - 5) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah - wilayah yang menjadi strategis daerah dan potensial
 - 6) Meningkatkan pola hubungan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur skala besar yang menjadi strategis Daerah
 - 7) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu antar sektor dalam implementasi pelaksanaan pembentukan kawasan - kawasan potensial.
 - 8) Meningkatkan kinerja sistem irigasi yang terintegrasi pada kawasan - kawasan pertanian dengan sistem pengelolaan terpadu
 - 9) Meningkatkan penataan pembangunan infrastruktur dan kawasan lingkungannya dalam mendukung percepatan implementasi kawasan strategis daerah baik bersifat kebutuhan aparatur maupun publik yang telah ditetapkan.
 - 10) Meningkatkan keterpaduan dalam pengadaan tanah untuk kawasan strategis daerah.
 - 11) Mengembangkan sistem penatagunaan tanah yang terintegrasi lintas sektor.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

Penyusunan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2023-2026, dalam rangka mewujudkan program prioritas RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Sesuai dengan Renstra Bappedalitbang Tahun 2023 - 2026,

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2020-2024, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023, maka sasaran Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional, dan produktif	Indek reformasi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappedalitbang	A
2.	Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian IKU RPD dengan nilai ≥ 76 % (tinggi)	85 % (Tinggi)
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	100 %
3.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian Litbang yang dapat dimanfaatkan	100 %

3.3. Strategi dan Kebijakan

3.3.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah;
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan;
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian sesuai dengan permasalahan dan kondisi obyektif sumber daya daerah;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana;
7. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan kinerja kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan.

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas system akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Peningkatan konsistensi implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan;

3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan;
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatkan keikutsertaan sumber daya manusia aparatur pada pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, fungsional maupun teknis;
7. Meningkatkan sistem prosedur dan standar kerja organisasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja.